

Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di MA YBH Cimindi Studi Kasus Studi Kasus dan Implikasinya Terhadap Kinerja Lembaga Pendidikan

Annisa Nurahmayanti

STITNU Al-Farabi Pangandaran; annisanurahmayanti@stitnualfarabi.com

Excellent :

Journal Of Islamic Studies

Vol 2 No 1, May 2025

Hal : 170-181

Received: 10 May 2025
Accepted: 25 May 2025
Published: 31 May 2025

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Abstract :

This study aims to examine the supervision of the use of education funds at Madrasah Aliyah YBH Cimindi and its implications for the performance of educational institutions. The background of this study is based on the importance of transparency and accountability in the management of education funds in order to achieve efficiency and improve the quality of education services. The research method used is a case study with a qualitative approach, involving observation, in-depth interviews with madrasah management, and analysis of financial documents and institutional performance reports. The results of the study indicate that the supervision system implemented is still internal and not fully systematic, so it has the potential to cause inefficiency in the use of funds. The implications of this weak supervision have an impact on the low effectiveness of education programs and decreased stakeholder trust in the institution. This study recommends the need to strengthen a more transparent and accountable fund supervision system in order to improve the overall performance of educational institutions.

Keywords : *Supervision of Education Funds, Accountability of Educational Institutions.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengawasan penggunaan dana pendidikan di Madrasah Aliyah YBH Cimindi serta implikasinya terhadap kinerja lembaga pendidikan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan agar tercapai efisiensi dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi, wawancara mendalam dengan pihak pengelola madrasah, dan analisis dokumen keuangan serta laporan kinerja lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan masih bersifat internal dan belum sepenuhnya sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana. Implikasi dari lemahnya pengawasan ini berdampak pada rendahnya efektivitas program-program pendidikan dan menurunnya kepercayaan stakeholder terhadap lembaga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem pengawasan dana yang lebih transparan dan akuntabel guna meningkatkan kinerja lembaga pendidikan secara keseluruhan.

Kata Kunci : *Pengawasan Dana Pendidikan, Akuntabilitas Lembaga Pendidikan.*

Pendahuluan

Pengelolaan dana pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Dana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan operasional, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel agar pengelolaan dana berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Madrasah Aliyah (MA) YBH Cimindi sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta menghadapi tantangan dalam hal pengawasan penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat. Lemahnya sistem pengawasan, minimnya keterlibatan stakeholder, serta kurangnya standar operasional prosedur dalam pelaporan keuangan menjadi permasalahan yang dapat memengaruhi kinerja lembaga secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya, proses penggalian dan pengelolaan dana pendidikan seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaannya (Nisa et al., 2022). Tanpa sistem pengawasan yang baik, pengelolaan dana berisiko mengalami penyimpangan, baik secara administratif maupun dalam implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi penting karena dana yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan, ketercukupan sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik.

Pengawasan pengelolaan keuangan sekolah harus terlaksana dengan maksimal. dinas pendidikan melakukan pengawasan pada pihak sekolah, dan pihak sekolah melaporkan apa saja pendapatan yang diperoleh serta daftar belanja tahunan tersebut sebelum melakukan pertemuan dengan orangtua siswa inspektorat melakukan pengawasan setelah pelaksanaan dari belanja dan pendapatan yang didapat sekolah. ketidaktepatan alokasi dan penggunaan dana dapat berdampak pada penurunan mutu layanan pendidikan, terbatasnya pengembangan sarana dan prasarana, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengawasan terhadap dana pendidikan dilakukan di MA YBH Cimindi, serta bagaimana hal tersebut berimplikasi terhadap kinerja lembaga baik dari aspek manajerial maupun akademik (Merisa & Safitri, 2023).

Pendidikan adalah faktor penting dalam pembangunan masyarakat dan negara, oleh karena itu, banyak negara yang memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang dan mengalokasikan dana yang besar untuk sektor pendidikan namun, penggunaan dana yang tidak efektif dan tidak efisien dalam sektor pendidikan dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah biasanya mengalokasikan dana pendidikan yang besar setiap tahunnya. Namun, terdapat masalah dalam pengawasan dana pendidikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan (Pitriyani, 2023)

Pelaksanaan penggalan dana pendidikan seharusnya diadakan melalui konsep/prosedur yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari peraturan terkait pendanaan pendidikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Kebijakan tersebut mengarahkan suatu sekolah untuk mengadakan penggalan dana dari batasan-batasan yang tentu tidak ada tujuan untuk merugikan masyarakat. Jadi dukungan pelaksanaan juga didorong dari motivasi serta inovasi dari organisasi dan khususnya oleh seorang pemimpin (kepala sekolah). Dari penyelenggaraan pengadaan dana dari sumber lain atau selain dari pemerintah membutuhkan strategi-strategi yang khusus untuk memperoleh harapan yang telah direncanakan (Ariskawanti & Munastiwi, 2022).

Dalam hal ini MA YBH Cimindi, ketika sedang melakukan proses penggalan dan penggunaan dana pendidikan menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan program-program pendidikan yang dirancang oleh pihak sekolah. Sebagai lembaga pendidikan swasta, MA YBH Cimindi memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana partisipatif dari masyarakat, sehingga pengawasan terhadap pengelolaan dana menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian antara alokasi dan penggunaan dana, keterlambatan pelaksanaan program, hingga menurunnya kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap lembaga.

Studi kasus ini mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana pengawasan penggunaan dana pendidikan dilakukan di MA YBH Cimindi, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, serta sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi implikasi dari praktik pengawasan tersebut terhadap kinerja lembaga, baik dari sisi manajerial, administratif, maupun capaian akademik siswa. Anggaran memiliki peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, setiap penanggung jawab program harus menjalankan aktivitas sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Karena anggaran memiliki kedudukan penting, seorang penanggung jawab program harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan (S, 2024).

Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah MA YBH Cimindi melakukan pengawasan dan pemeriksaan penggunaan anggaran mengawasi setiap pemasukan dan pengeluaran dana adalah bagian dari sistem pengawasan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan memantau atau melihat secara tidak langsung, seperti yang penulis lakukan, bahwa setiap pengeluaran dana harus memiliki persetujuan kepala sekolah atau bendahara. pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan memeriksa berbagai laporan keuangan untuk setiap kegiatan, yang diserahkan oleh bagian keuangan atau bendahara.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam sistem pengawasan penggunaan dana pendidikan di MA YBH Cimindi serta dampaknya terhadap kinerja lembaga. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi partisipatif untuk melihat langsung pelaksanaan pengawasan, serta dokumentasi berupa laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan permasalahan utama, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang ditemukan secara rinci. Lokasi penelitian dilakukan di MA YBH Cimindi yang terletak di

Jl. Bunisari No. 148 Cimindi, Kab. Pangandaran, dan subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, tim audit internal, serta stakeholder lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan di sekolah tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di MA YBH Cimindi

Sistem pengawasan penggunaan dana pendidikan di MA YBH Cimindi, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melibatkan berbagai mekanisme dan pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pengawasan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi secara berkala. Pada tahap perencanaan, pihak sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan kepala madrasah, bendahara BOS, dewan guru, serta komite madrasah. RKAS ini disusun berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan harus disesuaikan dengan juknis BOS dari Kementerian Agama. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan pos-pos yang telah disetujui. Setiap transaksi wajib didukung oleh bukti yang sah, seperti nota, faktur, atau kuitansi, dan dicatat secara rapi dalam pembukuan keuangan madrasah, proses pelaporan dilaksanakan secara triwulan melalui aplikasi pelaporan BOS online (misalnya ARKAS atau sistem lain dari Kemenag) (Iskandar, 2019).

Laporan ini memuat rincian realisasi anggaran dan digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban kepada pemerintah dan publik. Untuk memastikan akuntabilitas, dilakukan evaluasi dan audit baik secara internal oleh komite madrasah dan pengawas pembina, maupun eksternal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Partisipasi aktif dari masyarakat dan wali murid juga menjadi bagian dari mekanisme pengawasan sosial yang mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan sistem pengawasan yang terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan dana BOS di MA YBH Cimindi dapat dilakukan secara jujur, efisien, dan tepat sasaran, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tersebut.

Proses Pengelolaan dan Pengawasan Dana

Pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban proses ini diawali dengan penyusunan rencana anggaran oleh lembaga pendidikan, seperti sekolah atau institusi lainnya. Dalam tahap ini, pihak sekolah menyusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merinci kebutuhan dana untuk pelaksanaan program pendidikan dan operasional sekolah. Setelah rencana disusun, lembaga pendidikan mengajukan anggaran tersebut kepada pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga pendukung lainnya. Dana pendidikan bisa berasal dari berbagai sumber seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, sponsor, atau hibah.

Ketika dana telah diterima, proses selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, antara lain untuk membayar gaji guru dan staf, pengadaan perlengkapan belajar, pemeliharaan fasilitas, serta kegiatan-kegiatan siswa. Semua pengeluaran harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap pengeluaran dicatat dengan rapi dalam sistem pencatatan keuangan. Laporan keuangan disusun secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Laporan ini penting untuk mengetahui sejauh mana dana telah digunakan dan apakah penggunaannya sesuai dengan rencana awal (Ariskawanti & Munastiwi, 2022).

Pengawasan terhadap dana pendidikan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk internal sekolah seperti kepala sekolah dan bendahara, serta pihak eksternal seperti komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana dan bahwa dana benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai akhir dari seluruh proses, lembaga pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada semua pemangku kepentingan, baik pihak penyandang dana maupun masyarakat umum. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi kunci penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang bersih, adil, dan berkualitas (Nurmalasari et al., 2019).

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan adalah dua hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh dan digunakan oleh lembaga pendidikan dikelola dengan cara yang efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi mengacu pada prinsip keterbukaan

yang mengharuskan semua informasi terkait pengelolaan dana, seperti sumber dana, alokasi, dan penggunaan, dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa masyarakat, orang tua siswa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan harus bisa mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan, baik melalui laporan keuangan yang dipublikasikan secara rutin maupun rapat-rapat terbuka yang membahas pengelolaan anggaran sekolah. Keterbukaan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan sesuai dengan kepentingan pendidikan (Puteri et al., 2021).

Di sisi lain, akuntabilitas berfokus pada tanggung jawab pihak yang mengelola dana pendidikan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap pengeluaran dan pemanfaatan dana harus didokumentasikan dengan baik dan dapat dibuktikan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, bendahara, atau komite sekolah, harus siap memberikan penjelasan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan dana, sehingga tidak ada kebingungan atau kecurigaan mengenai pengelolaan dana tersebut akuntabilitas ini juga mencakup pengawasan eksternal, yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, seperti dinas pendidikan atau badan pemeriksa keuangan. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana (Arimbi Pamungkas1, 2022) .

Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa pengelolaan dana berlangsung dengan jujur dan efisien, serta dapat memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan. Selain itu, penerapan kedua prinsip ini juga penting untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam penggunaan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya membangun kepercayaan, tetapi juga menjaga agar dana pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Adapun ayat yang berkaitan dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana QS. An-Nisa' ayat 58 :

سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوْا أَنَّ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
﴿٥٨﴾ بِصِيرًا ُ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Transparansi pengelolaan dana

Transparansi pengelolaan dana pendidikan adalah suatu bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Prinsip ini menjadi dasar penting untuk menciptakan pengelolaan dana yang jujur, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama masyarakat dan orang tua siswa. Dalam praktiknya, transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai sumber dana yang diterima, rincian anggaran yang direncanakan, serta penggunaan dana yang telah dilaksanakan. Informasi ini seharusnya disampaikan secara rutin melalui media yang dapat dijangkau oleh publik, seperti papan informasi sekolah, pertemuan dengan komite sekolah, atau bahkan melalui situs web resmi lembaga pendidikan. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan dana yang dilakukan oleh sekolah. Dengan mengetahui ke mana dan untuk apa dana digunakan, masyarakat dapat memastikan bahwa dana benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, seperti peningkatan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik (Hidayat & Tolla, 2022). Transparansi juga menciptakan kepercayaan antara pengelola pendidikan dan pihak-pihak yang mendukungnya secara finansial. Ketika semua informasi disampaikan dengan jujur dan terbuka, maka kepercayaan akan tumbuh, partisipasi publik akan meningkat, dan peluang terjadinya penyimpangan dana dapat diminimalisir. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi juga merupakan komitmen untuk mengelola dana pendidikan dengan penuh tanggung jawab dan integritas demi kemajuan mutu pendidikan.

Tantangan dalam Pengawasan Penggunaan Dana

Tantangan dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan merupakan hal yang sering dihadapi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan di sektor pendidikan. Salah satu tantangan yang paling umum adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang

pengawasan dan akuntansi. Banyak sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, masih kekurangan tenaga administrasi yang mampu menyusun laporan keuangan secara akurat dan memahami regulasi keuangan dengan baik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam sistem pelaporan yang digunakan. Beberapa lembaga pendidikan belum memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai dan terintegrasi secara digital. Akibatnya, proses pelaporan menjadi lambat, tidak akurat, dan menyulitkan proses verifikasi oleh pihak yang berwenang (Oktamia Anggraini Putri, 2022).

Faktor lain yang juga menjadi tantangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Masyarakat atau orang tua siswa sering kali tidak memiliki informasi yang cukup atau merasa tidak memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan dana di sekolah. Rendahnya tingkat literasi keuangan juga membuat masyarakat tidak memahami bagaimana cara membaca laporan keuangan atau menilai penggunaan dana secara objektif. Di sisi lain, kurangnya transparansi dari pihak pengelola dana juga menjadi penghambat efektifnya pengawasan. Jika informasi tentang dana pendidikan tidak disampaikan secara terbuka dan berkala, maka pengawasan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh berbagai aspek penting. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Belum meratanya pengawasan dari pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. Lembaga pengawas sering kali memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh sekolah secara rutin, terutama yang berada di wilayah yang sulit diakses. Akibatnya, beberapa sekolah jarang atau bahkan tidak pernah diaudit, sehingga penggunaan dan pertanggungjawaban dana tidak terpantau secara optimal. Dengan berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, maupun pihak swasta untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif demi mendukung kualitas pendidikan yang berkelanjutan (Syarifuddin et al., 2024).

Implikasi Pengawasan Dana terhadap Kinerja Lembaga

Implikasi pengawasan dana terhadap kinerja lembaga pendidikan sangat besar dan berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan pendidikan yang diberikan ketika pengawasan dana dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, lembaga pendidikan cenderung lebih disiplin dalam mengelola keuangan, lebih bertanggung jawab, dan lebih fokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Pengawasan yang baik mendorong pengelola

lembaga untuk menggunakan dana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Hal ini berdampak positif pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar mengajar, peningkatan fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kinerja lembaga pun cenderung meningkat karena semua program dan kegiatan didukung oleh pengelolaan dana yang tepat dan terukur (Waliyah et al., 2021).

Di sisi lain, adanya pengawasan juga menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Lembaga yang diawasi akan lebih terbuka terhadap publik, lebih hati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, serta lebih konsisten dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan orang tua siswa terhadap pengelolaan lembaga tersebut. Selain itu, pengawasan yang konsisten dapat menjadi alat evaluasi yang efektif untuk menilai sejauh mana program-program pendidikan telah berjalan sesuai rencana dan apakah penggunaan dana sudah memberikan hasil yang optimal. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka lembaga dapat segera melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan.

Sebaliknya, jika pengawasan lemah atau tidak dilakukan secara serius, maka risiko penyalahgunaan dana, ketidakefisienan, dan rendahnya akuntabilitas akan semakin besar hal ini bisa berdampak buruk pada kualitas pendidikan, menurunkan motivasi para tenaga pendidik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dengan kata lain, pengawasan dana bukan sekadar prosedur administratif, melainkan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja lembaga pendidikan secara menyeluruh. Pengawasan yang kuat, terstruktur, dan melibatkan berbagai pihak akan mendorong terciptanya pengelolaan yang baik dan menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Batubara, 2022).

Kesimpulan

Pengelolaan dan pengawasan dana pendidikan di MA YBH Cimindi menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penggunaan anggaran. Sistem pengawasan dilakukan melalui pelibatan berbagai pihak, termasuk internal sekolah dan masyarakat, untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan sesuai perencanaan. Transparansi diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi keuangan, sementara akuntabilitas tercermin dari tanggung jawab pengelola dalam

menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan dana. Pengawasan yang baik memberikan dampak positif terhadap kinerja lembaga pendidikan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh.

Referensi

- Arimbi Pamungkas¹, A. T. (2022). Students' Difficulties at Elementary School in Increasing Literacy Ability, *Attractive : Innovative Education Journal* 4(1), 1–12.
- Ariskawanti, E., & Munastiwi, E. (2022). Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Ma ' arif Wadaslintang. *Pendidikan Riset Dan Konseptual*, 6(3), 442–450.
- Batubara, H. (2022). Analisis Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 258–269. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i3.169>
- Hidayat, F., & Tolla, I. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)*, 3(1), 66. <https://doi.org/10.26858/jak2p.v3i1.16167>
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan. *Idaarah*, 3(1), 114–123. <https://core.ac.uk/download/pdf/234752746.pdf>
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.218>
- Nisa, V., Rachmawati, A. A., Janah, E. U., & Trihantoyo, S. (2022). Analisis Prinsip Akuntabilitas Manajemen Berbasis Sekolah (Mbs) Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Sekolah. *REFLEKSI: Jurnal Riset Dan Pendidikan*, 2(2), 69–82.
- Nurmalasari, I., Jamil, Z. L., & Hidayat, A. (2019). Pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah ibtidaiyah swasta di bandung. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 5(1), 1–19. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasad/article/view/1626>
- Oktamia Anggraini Putri. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(20), 1349–1358.
- Pitriyani, P. (2023). Pengawasan Dana Pendidikan. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.150>

- Puteri, E. S. T., Tunti, M. E. D., Joyce, S., & Rafael, M. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*. 9(1). Maret, 2021, 1–8.
<https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- S, D. S. (2024). Pembiayaan Pendidikan di SMK MU Cimerak : Analisis Penggunaan dan Pengawasan Anggaran. *Jurnal Pelita Nusantara*, 2(3), 227–231.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.597>
- Syarifuddin, S., Rahmattullah, R., & Akmaluddin, A. (2024). Efektifitas Penggunaan Dana Bosp Pada Sekolah Dasar Negeri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Model Cipp Di Kabupaten Aceh Besar. *Visipena*, 53–74.
<https://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/view/2556%0Ahttps://ejournal.bbg.ac.id/visipena/article/download/2556/1552>
- Waliyah, S., Dini, S. H., & Syarif, A. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Masa Pandemi Covid-19 di SMK Gazza Wiguna 1. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 77–98.
<https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.272>